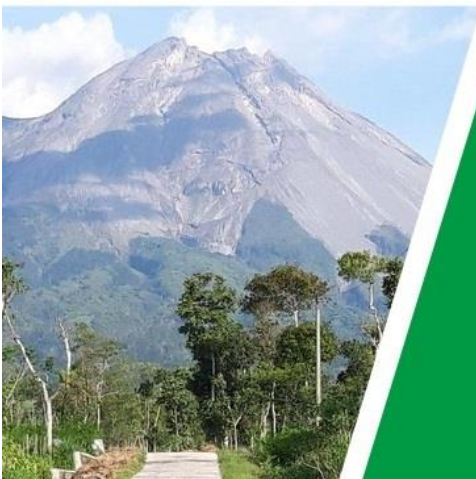


**TAHUN
2020**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan Gondosuli Nomor 6 Yogyakarta

Telp. (0274) 588938

Website : <http://www.dpkp.jogjaprov.go.id>

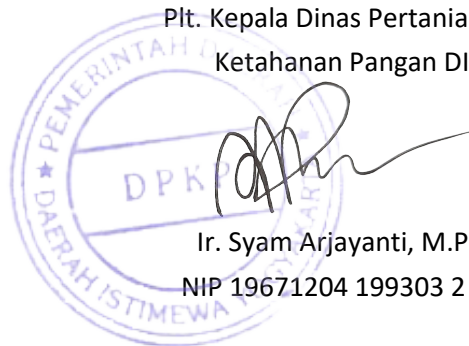
Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DPKP DIY) Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. LKjIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2020 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2021

Pt. Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan DIY



Ir. Syam Arjayanti, M.P.A.

NIP 19671204 199303 2 004

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY tahun 2020 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan”:
 - Capaian sasaran diukur dengan indikator nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 9 (sembilan) Program yakni Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Peningkatan Produksi Hortikultura, Program Peningkatan Produksi Perkebunan, Peningkatan Populasi Peternakan, Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan, Pengembangan SDM Pertanian dan Penyuluhan, Perlindungan Tanaman Pertanian, Pengembangan Perbenihan Pertanian, Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2020 sebesar 7.183.372 juta rupiah sampai dengan bulan Desember 2020 terealisasi 7.007.525,40 juta rupiah. Persentase realisasi terhadap target mencapai 97,55%.
 - Dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 7.006.748,8 terjadi peningkatan sebesar 0,01%.

2. Capaian sasaran strategis 2 “Terwujudnya Ketahanan Pangan”:
 - Capaian sasaran diukur dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program yakni Program Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2020 sebesar 90,52 sampai dengan bulan Desember 2020 terealisasi 94,7, dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 104,62%.
 - Dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 95,5 terjadi penurunan sebesar 0,08 atau 0,84%

3. Capaian sasaran strategis 3 “Pemenuhan Pangan Masyarakat “:
 - Capaian sasaran diukur dengan indikator persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program yakni program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2020 sebesar 39,74% sampai dengan bulan Desember 2020 terealisasi 41,08%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 96,63%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah DIY ke depan, tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19 masih berlangsung dan belum tahu kapan akan berakhir, hal ini akan mempengaruhi perencanaan dan penganggaran pembangunan pertanian dan pangan pada tahun-tahun mendatang.
2. Kesejahteraan petani menurun karena dampak pandemi Covid-19.
3. Regenerasi sumber daya manusia pertanian.
4. Peningkatan produksi pertanian dengan pengembangan pertanian skala besar melalui korporasi petani dan skala rumah tangga melalui optimasi budidaya pertanian di lahan pekarangan.
5. Pertanian ramah lingkungan.
6. Revisi terhadap Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, penyelesaian berbagai aturan pendukungnya, dan implementasinya.
7. Sosialisasi Perda Perindungan dan Pemberdayaan Petani dan penyelesaian berbagai aturan pendukungnya.
8. Stabilisasi harga pangan di tingkat produsen dan konsumen.
9. Berubahnya preferensi konsumsi masyarakat DIY karena pengaruh melemahnya kondisi perekonomian.
10. Keamanan pangan sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan masyarakat mulai dari individu perlu terus ditingkatkan.
11. Masih terdapat 4 (empat) desa rawan pangan di DIY.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR	8
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	9
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	11
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	14
1.4 Isu-isu Strategis	17
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	18
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2019	27
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	28
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	28
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	30
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2020.....	32
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	35
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	39
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020	39
3.2 Realisasi Anggaran	56
3.3 Inovasi	57
BAB IV PENUTUP	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	62

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	18
Tabel I.2	Sarana-Prasarana	23
Tabel I.3	Perbandingan Anggaran Tahun 2018 dan 2019	25
Tabel I.4	Rincian Anggaran APBN DPKP DIY	26
Tabel II.1	Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah DIY, 2017-2022.....	29
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan	30
Tabel II.3	Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2020.....	32
Tabel II.4	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2020	34
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Kepala DPKP DIY Tahun 2020	36
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	39
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2020	40
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1.....	41
Tabel III.4	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1	42
Tabel III.5	Perbandingan PDRB Year on Year (YOY).....	43
Tabel III.6	Capaian Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2020	45
Tabel III.7	Produksi Tanaman Pangan di D.I. Yogyakarta 2019-2020**	46
Tabel III.8	Produksi Hortikultura di D.I. Yogyakarta 2019-2020**	47
Tabel III.9	Produksi Perkebunan di D.I. Yogyakarta 2019-2020**	48
Tabel III.10	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2.....	49
Tabel III.11	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2	50
Tabel III.12	Capaian Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran 2 Strategis Tahun 2020	52
Tabel III.13	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3.....	53
Tabel III.14	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3	54

Tabel III.15 Capaian Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran 3 Strategis Tahun 2020	56
Tabel III.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020	57

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja	10
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	12
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	14
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	38
Gambar III.1 Nilai Tukar Petani Tahun 2019 dan 2020	44
Gambar III.2 Grafik Perbandingan Skor PPH Standar dan Capaian Skor PPH DIY Tahun 2020** (Angka Sangat Sementara).....	51
Gambar III.3 Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan untuk Makanan Tahun 2014-2020** (Angka Sangat Sementara)	55
Gambar III.4 Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkantoran (SIAP).....	58

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2019*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

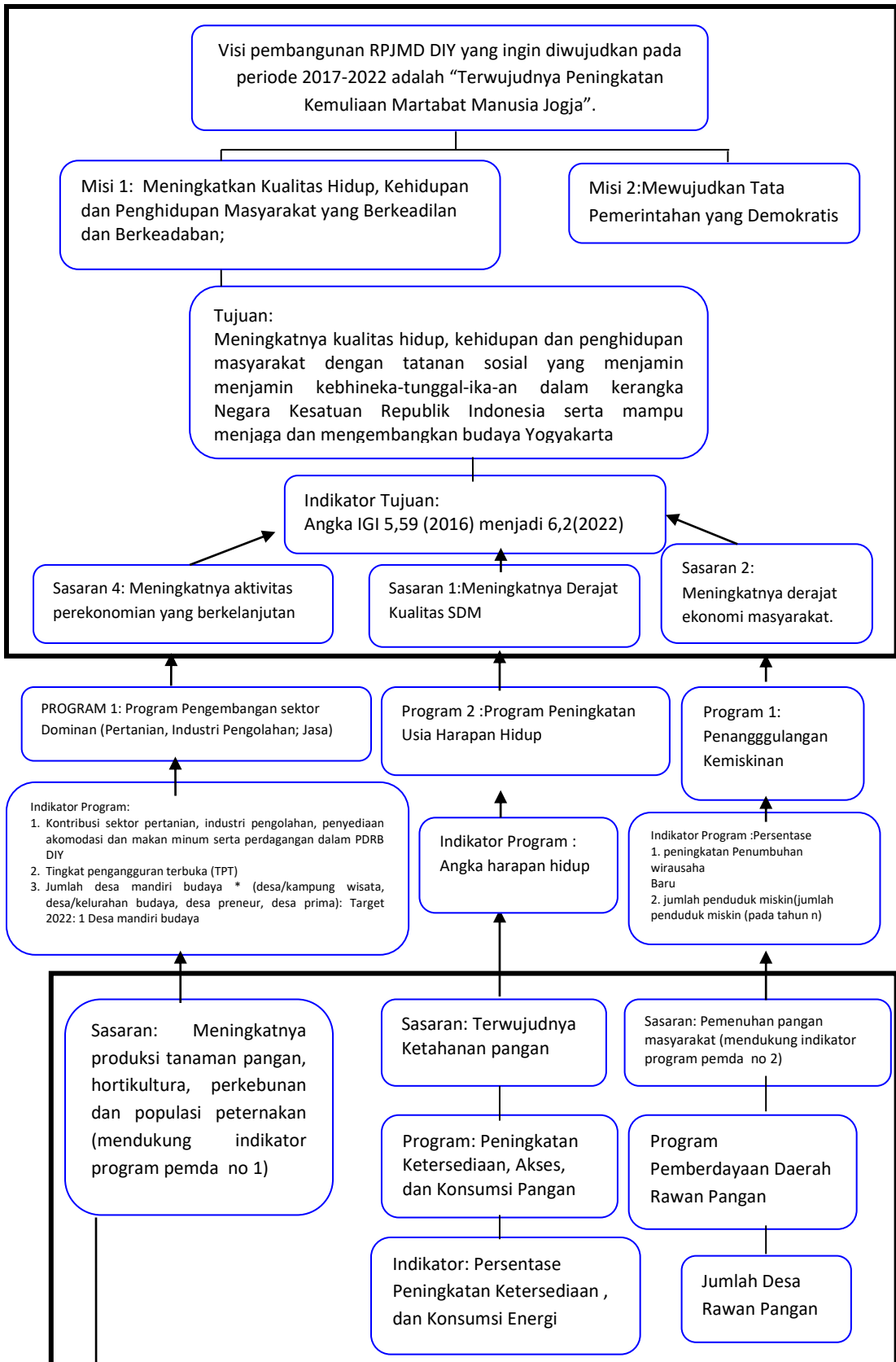
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 *Cascading* Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017–2022. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja

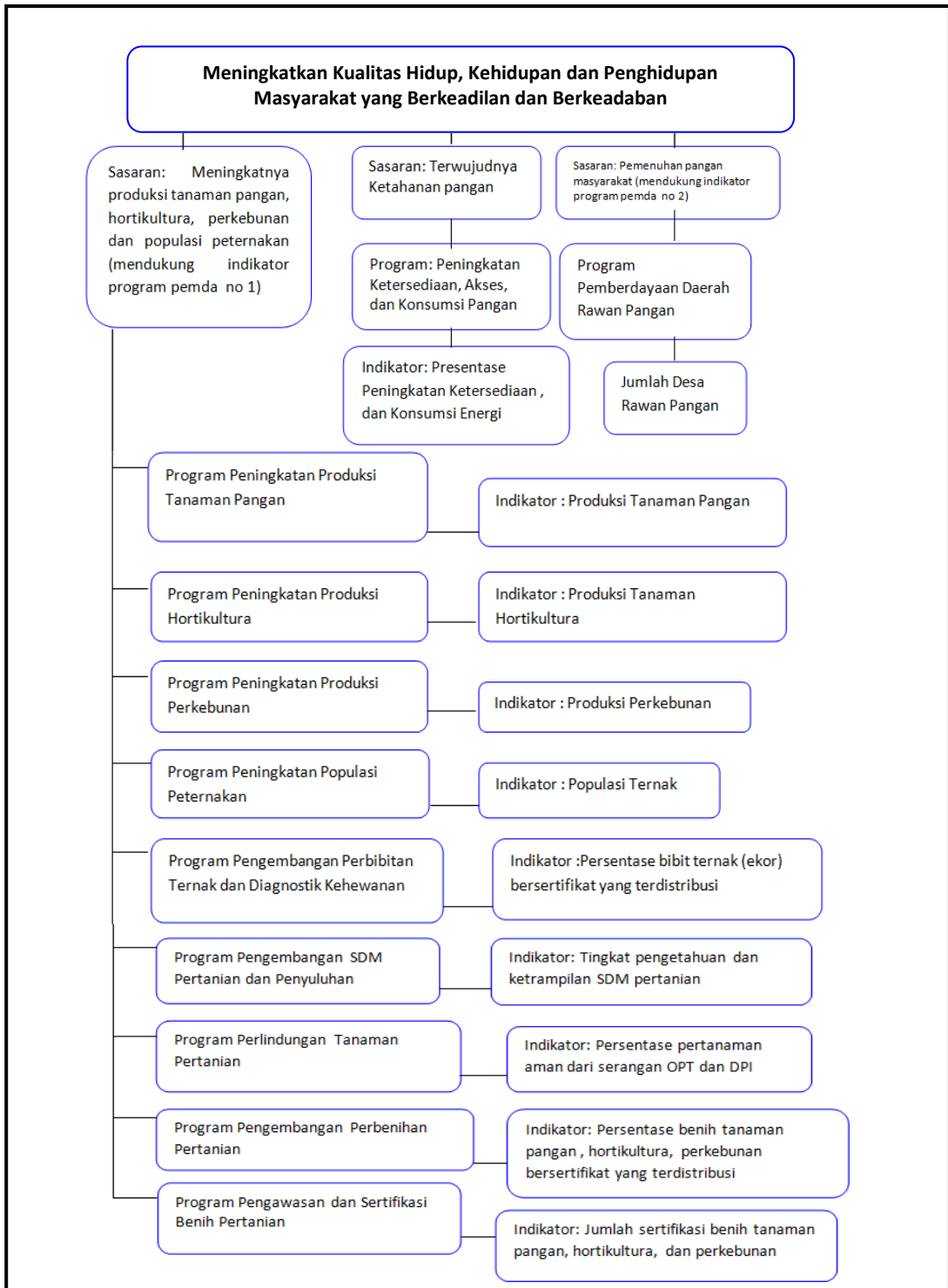


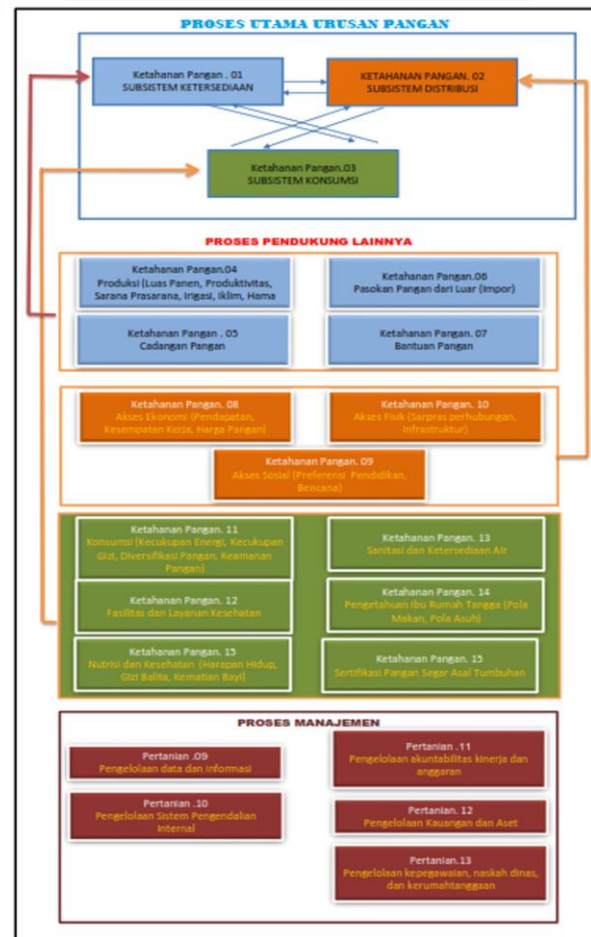
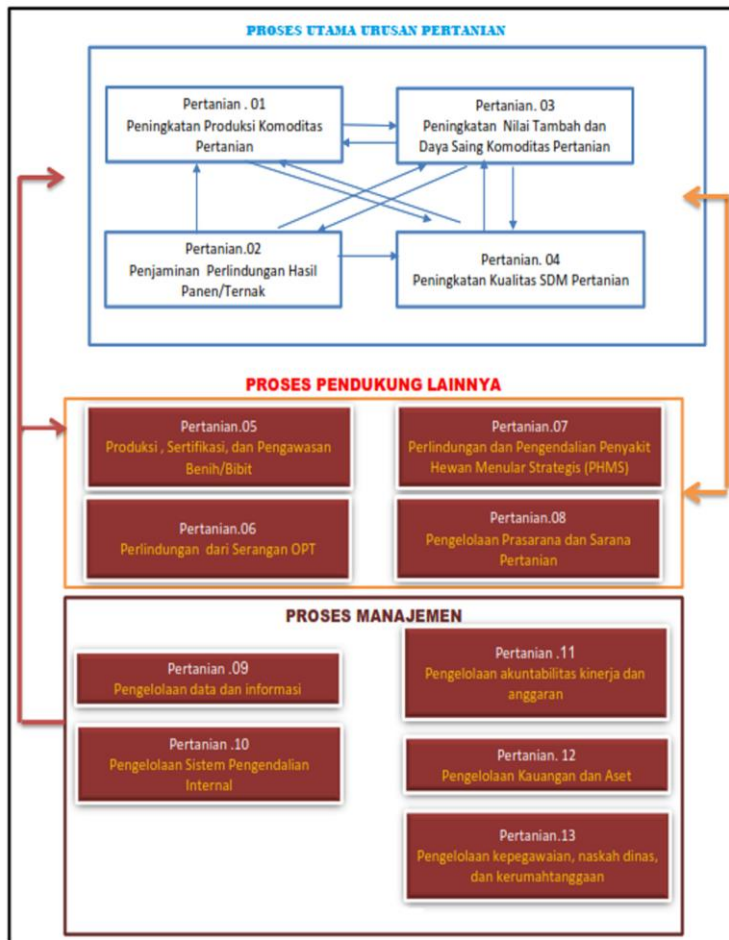


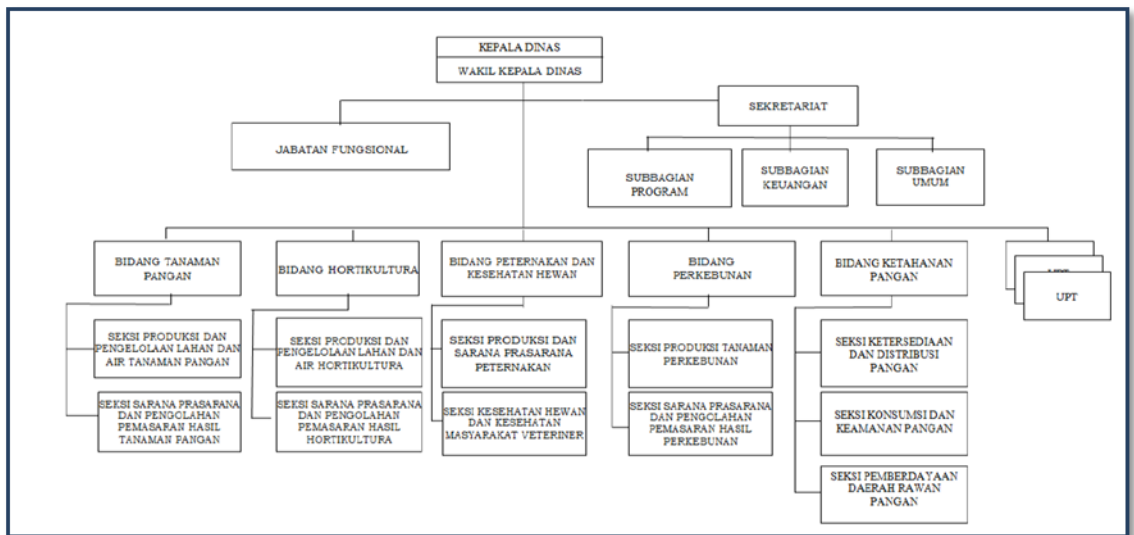
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 1.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY







1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja dinas;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
3. Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan;
4. Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan ketahanan pangan;
5. pelaksanaan pengembangan pascapanen, pengolahan, mutu dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan;
6. Fasilitasi pembiayaan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
7. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan Kabupaten/Kota;
8. Penyelenggaraan kegiatan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan lintas Kabupaten/Kota;

9. Pelestarian tradisi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan;
10. Pengembangan kemitraan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan;
11. Fasilitasi, pelayanan, sertifikasi komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan;
12. Fasilitasi sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan;
13. Penyelenggaraan pembinaan, sertifikasi, dan pengawasan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
14. penyelenggaraan pembinaan, sertifikasi, dan pengawasan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
15. penyelenggaraan perlindungan tanaman terhadap organisme pengganggu tumbuhan;
16. penyelenggaraan pengujian mutu dan keamanan pangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
17. penyelenggaraan produksi benih sumber tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
18. penyelenggaraan produksi bibit ternak dan bibit pakan ternak;
19. penyelenggaraan diagnostik kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; s. pengembangan sumber daya manusia pertanian;
20. penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
21. penyelenggaraan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan;
22. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
23. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
24. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
25. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
26. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota; dan
27. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

Sesuai pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I.Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas; 2. Wakil Kepala Dinas; 3. Sekretariat, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Subbagian Program; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Umum. 4. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan; dan b. Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. 5. Bidang Hortikultura, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Hortikultura; dan b. Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura. 6. Bidang Perkebunan, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan; dan b. Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perkebunan. 7. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan; dan b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 8. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; b. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan c. Seksi Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan. 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 10. Jabatan fungsional. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawas Benih Tanaman b. Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman c. Widyaiswara d. Medik Veteriner e. Paramedik Veteriner f. Pengawas Bibit Ternak g. Pengawas Mutu Pakan h. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan i. Analis Pasar Hasil Pertanian j. Analis Ketahanan Pangan k. Pengawas Mutu Hasil Pertanian l. Arsiparis m. Pelaksana Barang 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dibawah kasubbag program: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusun program anggaran dan pelaporan 2) Pengelola sistem dan jaringan b. Dibawah kasubbag keuangan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Bendahara 2) Pengadministrasian keuangan 3) Pengelola gaji 4) Pengelola akuntansi 5) Verifikator data laporan keuangan c. Dibawah kasubbag umum: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasian umum 2) Pengadministrasian persuratan 3) Pranata kearsipan 4) Pengadministrasi pepegawaian 5) Teknisi sarana dan prasarana 6) Pengelola barang milik negara 7) pengemudi d. Dibawah kepala seksi produksi dan pengelolaan lahan dan air TP <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi umum 2) Pengelola budidaya dan pengembangan TP e. Dibawah kepala seksi sarpras dan pengolahan pemasaran hasil TP <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis pemasaran hasil pertanian f. Dibawah kepala seksi produksi dan pengelolaan lahan dan air hortikultura: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi umum 2) Pengelola lahan pertanian g. Dibawah kepala seksi Sarpras dan pengolahan pemasaran hasil hortikultura: <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis pemasaran hasil pertanian h. Dibawah kepala seksi produksi tanaman perkebunan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi umum 2) Pengawas mutu hasil perkebunan i. Dibawah kepala seksi Sarpras dan pengolahan pemasaran hasil perkebunan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyuluh perkebunan j. Dibawah kepala seksi produksi dan sarana prasarana peternakan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi umum 2) Pengelola budidaya pengembangan ternak dan hewan lainnya k. Dibawah kepala seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawas hygiene, sanitasi usaha peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner. l. Dibawah kepala seksi ketersediaan dan distribusi pangan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi umum 2) Pengelola ketahanan pangan m. Dibawah kepala seksi konsumsi dan keamanan pangan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelola pola pangan harapan n. Dibawah kepala seksi pemberdayaan daerah rawan pangan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelola ketersediaan dan kerawanan pangan

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2017-2022 antara lain sebagai berikut:

1. Penanganan tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian;
2. Upaya peningkatan produksi masih rentan terhadap pencemaran, kerusakan, risiko bencana alam dan perubahan iklim;
3. Belum optimalnya mekanisasi pertanian sebagai sarana mengefektifkan dan mengefisienkan usaha tani;
4. Lemahnya kelembagaan petani yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia petani;
5. Kurangnya pemenuhan standar mutu hasil, industri pengolahan dan perluasan pemasaran hasil pertanian;
6. Lemahnya akses petani terhadap permodalan;
7. Pengelolaan usaha tani yang berorientasi pada pasar regional dan internasional;
8. Kurangnya jumlah SDM di sektor pertanian karena semakin menurunnya minat generasi muda untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian; serta terbatasnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usahatani;
9. Kurangnya jalinan kemitraan agribisnis antara kelembagaan petani dengan mitra pemasaran;
10. Kurangnya daya dukung lahan pertanian melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, penerapan pola tanam yang tepat.
11. Kondisi kemiskinan yang dapat berlanjut pada kerawanan pangan.
12. Diversifikasi ketersediaan dan konsumsi pangan berkelanjutan.
13. Kondisi dan beban ganda keamanan pangan.
14. Peningkatan produksi komoditas perkebunan terutama pada komoditas tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, teh, tembakau, dan cengkeh.
15. Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk perkebunan.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana, dan Anggaran

a. Dukungan SDM

Dukungan sumberdaya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan dan Jenis Kelamin

JABATAN	FORMASI		PEGAWAI YANG ADA		JENIS KELAMIN	
	JUMLAH	KUALIFIKASI	JUMLAH	KUALIFIKASI	L	P
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1	S1, S2	-	S2	-	-
Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1	S1, S2	1	S2	-	1
Sekretaris	1	S1, S2	-	S2	-	-
Kepala Subbagian Program	1	S1	1	S 2	-	1
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	3	S1	4	S1 , S2	2	2
Pengelola Sistem dan Jaringan	1	S1	1	S1	1	-
Kepala Subbagian Keuangan	1	S1	1	S1	-	1
Bendahara	3	S1	2	S1, SMA	1	1
Pengadministrasi Keuangan	4	D3	4	SLTA	3	1
Pengelola Gaji	1	D3	1	SLTA	1	-
Pengelola Akuntansi	1	D3	1	SLTA	-	1
Verifikator Data Laporan Keuangan	1	D3	1	SLTA	1	-
Kepala Subbagian Umum	1	S1	1	S2	-	1
Pengadministrasi Persuratan	1	D3	1	SMP	1	-
Pranata Kearsipan	1	D3	1	D3	-	1
Pengadministrasi Kepegawaian	3	D3	3	S1 ,D3, SLTA	-	3
Teknisi Sarana dan Prasarana	1	D3	1	SLTA	1	-
Pengelola Barang Milik Negara	4	D3	3	S1, SLTA	3	-
Pengemudi	2	SLTA	1	SLTA	1	-
Kepala Bidang Tanaman Pangan	1	S1, S2	1	S2	-	1
Kepala Seksi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan	1	S1	1	S2	-	1
Pengadministrasi Umum	1	SLTA	1	SLTA	1	-
Pengelola Budidaya Dan Pengembangan Tanaman Pangan	4	S1	4	D3, S1	1	3

JABATAN	FORMASI		PEGAWAI YANG ADA		JENIS KELAMIN	
	JUMLAH	KUALIFIKASI	JUMLAH	KUALIFIKASI	L	P
Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	1	S1	1	S2	1	-
Analisis Pemasaran Hasil Pertanian	4	S1	3	S1- SLTA	-	3
Kepala Bidang Hortikultura	1	S1, S2	1	S2	-	1
Kepala Seksi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Hortikultura	1	S1	1	S2	-	1
Pengadministrasi Umum	1	SLTA	1	SLTA	-	1
Pengelola Lahan Pertanian	5	S1	3	S1, SLTA	2	1
Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura	1	S1	1	S1	1	-
Analisis Pemasaran Hasil Pertanian	4	S1	4	S1, SLTA	2	2
Kepala Bidang Perkebunan	1	S1	1	S2	-	1
Kepala Seksi Produksi Tanaman Perkebunan	1	S1	1	S2	1	-
Pengadministrasi Umum	1	SLTA	1	SLTA	-	1
Pengawas Mutu Hasil Perkebunan	4	S1	5	S1, SLTA	3	2
Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perkebunan	1	S1	1	S1	-	1
Penyuluh Perkebunan	4	S1	4	S1, SLTA	1	3
Kepala Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1	S1	1	S2	-	1
Kepala Seksi Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan	1	S1	1	S1	1	-
Pengadministrasi Umum	2	D3	1	SLTA	-	1
Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya	4	S1	4	S1- S2	3	1
Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	S1	1	S2	-	1
Pengawas Hygiene, Sanitasi Usaha Peternakan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	5	S1	3	S2, SLTA	1	2
Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1	S1	1	S2	1	-
Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan	1	S1	1	S1	1	-

JABATAN	FORMASI		PEGAWAI YANG ADA		JENIS KELAMIN	
	JUMLAH	KUALIFIKASI	JUMLAH	KUALIFIKASI	L	P
Pengadministrasi Umum	1	SLTA	1	SLTA	1	-
Pengelola Ketahanan Pangan	5	S1	3	S1- SLTA	1	2
Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	S1	1	S1	-	1
Pengelola Pola Pangan Harapan	5	S1	4	S1, SLTA	1	3
Kepala Seksi Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	1	S1	1	S1	1	-
Pengelola Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan	5	S1	5	S1	3	2
Kepala Balai Proteksi Tanaman Pertanian	1	SI,S2	1	S2	1	-
Kepala subbag tata usaha uptd BPTP	1	S1	1	S2	-	1
Bendahara	2	S1	1	SLTA	1	-
Pengelola barang milik negara	2	D3	2	SLTA	2	-
Pengadministrasi kepegawaian	1	D2	-	SLTA	-	-
Penyusun program anggaran dan pelaporan	1	S1	1	D4	1	-
Pengadministrasi keuangan	1	D3	1	S1	-	1
Pengadministrasi persuratan	1	SLTA	1	SLTP	1	-
Teknisi sarana dan prasaranan	1	SLTA	1	SD	1	-
Pranata Kearsipan	1	D3	-	SLTA	-	-
Pengelola Akuntansi	1	S1	1	SLTA	1	-
Verivikator data laporan keuangan	1	D3	1	SLTA	1	-
Pengelola Gaji	1	D3	1	SLTA	-	1
Teknisi Sarana Prasarana	1	D3	1	SD	1	-
Kepala Seksi Pelayanan Teknis	1	S1	1	S2	1	-
Pengelola perlindungan tanaman pangan	6	S1	3	SLTA, S1	2	1
Kepala Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu	1	S1	1	S2	-	1
Pengelola organisme pangganggu tanaman	7	S1	5	SLTA ,S1	4	1
Kepala Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian	1	S1	1	S2	-	1

JABATAN	FORMASI		PEGAWAI YANG ADA		JENIS KELAMIN	
	JUMLAH	KUALIFIKASI	JUMLAH	KUALIFIKASI	L	P
Kepala subbag tata usaha BPSDMP	1	S1	1	S2	1	-
Penyusun program anggaran dan pelaporan	1	S1	1	S1	-	1
Bendahara	1	S1	1	SLTA	-	1
Pranata Kearsipan	1	D3	1	SLTA	-	1
Pengadministrasi Kepegawaian	1	D3	1	SLTA	1	-
Teknisi sarana dan prasaranan	1	D3	1	SLTP	1	-
Pengelola barang milik negara	2	D3	2	SLTA	2	-
Pengadministrasi Persuratan	1	D3	1	SD	1	-
Kepala Seksi Pelatihan Pertanian	1	S1	1	S1	1	-
Pranata diklat	6	S1	5	SLTA,D3,S1	3	2
Kepala Seksi Penyuluhan Pertanian	1	S1,S2	1	S1	1	-
Pengelola program penyuluhan	4	S1	3	SLTA, S1	2	1
Kepala Balai Pengembangan Pemibitan Dan Diagnostik Kehewan	1	S2	1	S1	1	-
Kepala subbag tata usaha	1	S1	1	D4	1	-
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	S1	1	S1	1	-
Pengelola Barang Milik Negara	2	D3	2	SLTA	1	1
Pengadministrasi Keuangan	1	D3	1	SLTA	-	1
Pengadministrasi Kepegawaian	1	D3	1	SLTA	1	-
Pengelola Akuntansi	1	D3	1	S1	-	1
Pengadministrasi Persuratan	1	D3	1	SLTA	1	-
Bendahara	2	S1	1	SLTA	-	1
Kepala Seksi Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1	S1	1	S1	-	1
Pengelola Peternakan	7	D3	8	SD,SLTP,SLTA	8	-
Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Besar	3	S1	2	D4	1	1
Kepala Seksi Diagnostik Kehewan	1	S1	1	S1	1	-
Pengelola Laboratorium	6	D3	5	SLTA,S1,S2	4	1
Kepala Balai Pengembangan Perbenihan Dan Mutu Benih Tanaman Pertanian	1	S1	1	S2	1	-
Kepala subbag tata usaha	1	S1	1	S1	-	1

JABATAN	FORMASI		PEGAWAI YANG ADA		JENIS KELAMIN	
	JUMLAH	KUALIFIKASI	JUMLAH	KUALIFIKASI	L	P
BPPMBTP						
Pengadministrasi Persuratan	1	D3	-	-	-	-
Pranata Kearsipan	1	D3	1	SLTP	1	-
Penyusun program anggaran dan pelaporan	1	S1	1	S1	1	-
Pengadministrasi Kepegawaian	1	D3	-	-	-	-
Pengelola barang milik negara	2	D3	2	SLTA, D3	1	1
Bendahara	1	S1	2	SLTA	2	-
Pengadministrasi keuangan	1	D3	1	SLTA	1	-
Pengelola gaji	1	D3	1	SLTA	1	-
Pengelola akuntansi	1	D3	-	-	-	-
Verifikator data laporan keuangan	1	D3	-	-	-	-
Teknisi sarana dan prasaranan	1	D3	1	SLTA	1	-
Kepala Seksi Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pertanian	1	S1	1	S1	1	-
Analisis Potensi Perbenihan	2	S1	2	S1/SLTA	2	-
Pengelola Teknologi Perbenihan	33	D3	26	S2/S1/SLTA	21	5
Kepala Seksi Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian	1	S1	1	S2	-	1
Pengujian coba Pembibitan dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	3	S1	3	S2/S1/SLTA	2	1
Jabatan Fungsional						
Penyuluh Pertanian	11	SLTA, S1, S2	12	S1	6	6
Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)	42	SLTA, S1, S2	25	S1, S2	19	6
Analisis Pasar Hasil Pertanian (APHP)	5	SLTA, S1, S2	3	S1	1	2
Analisis Ketahanan Pangan (AKP)	4	S1, S2	5	S1	2	3
Arsiparis	1	D3	1	SLTA	-	1
Widyaiswara	9	S2	2	S1, S2	-	2
Pengawas Benih Tanaman (PBT)	37	SLTA, S1,	15	SLTA, S1	11	4
Pengawas Benih Ahli	9	S1	15	S1	10	5
Pengawas Benih Terampil	15	S1	2	S1	1	1

JABATAN	FORMASI		PEGAWAI YANG ADA		JENIS KELAMIN	
	JUMLAH	KUALIFIKASI	JUMLAH	KUALIFIKASI	L	P
Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman	3	S1	-	-	-	-
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)	74	SLTA, S1, S2	46	SLTA, S1, S2	33	13
Medik Veteriner	8	S1 Kedokteran Hewan	4	S1, S2	2	2
Paramedik Veteriner	5	Sek. Peternak D III Peternakan	5	SLTA, D3, S1	2	3
Pengawas Bibit Ternak	7	S1	5	S1	1	4
Pengawas Mutu Pakan	7	S1	3	S1	1	2
Jumlah	499		348		216	132

Berdasarkan data pada Tabel I.1, jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sejumlah 348 orang dengan jumlah laki laki sebanyak 216 orang dan perempuan sebanyak 132 orang. Jumlah pegawai laki laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai perempuan. Jumlah formasi sebanyak 499 orang. Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 151 orang, terdiri dari pejabat pelaksana substantif dan pejabat pelaksana administratif. Tingkat pendidikan paling tinggi adalah lulusan S2 sedangkan terendah adalah lulusan SD. Berdasarkan jenjang pendidikan didominasi oleh lulusan S1.

a. Keadaan Sarana dan Prasarana

Keadaan Sarana dan Prasarana di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dapat dilihat pada Tabel I.2. Pengelolaan aset dari APBN menggunakan aplikasi SIMAK-BMN sedangkan aset dari APBD dikelola menggunakan aplikasi SIMBADA.

Tabel I.2. Sarana-Prasarana

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	JUMLAH HARGA (RP)
1	Tanah Persil	18	70,616,350,000.00
2	Tanah Non Persil	27	49,178,310,000.00
3	Lapangan	1	6,986,147,899.00
4	Alat Besar Darat	22	359,450,000.00
5	Alat Bantu	33	1,206,758,307.99

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	JUMLAH HARGA (RP)
6	Alat Angkutan Darat Bermotor	277	6,707,763,079.00
7	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	22	36,147,000.00
8	Alat Angkutan Bermotor Udara	1	148,400,000.00
9	Alat Bengkel Bermesin	9	70,625,906.00
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	2	1,780,000.00
11	Alat Ukur	39	244,017,400.00
12	Alat Pengolahan	401	9,093,578,199.97
13	Alat Kantor	485	1,410,435,464.04
14	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	212	450,784,105.00
15	Alat Studio	164	938,700,100.00
16	Alat Komunikasi	97	516,999,100.00
17	Peralatan Pemancar	7	63,415,900.00
18	Alat Kedokteran	24	75,909,115.00
19	Alat Kesehatan Umum	1	6,900,000.00
20	Unit Alat Laboratorium	297	7,684,257,560.01
21	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	4	546,235,115.00
22	Alat Peraga Praktek Sekolah	29	62,795,000.00
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	3	100,300,000.00
24	<i>Radiation Application And Nondestructive Testing Laboratory</i>	4	3,600,000.00
25	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	43	355,589,179.98
26	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	1	7,500,000.00
27	Senjata Api	8	26,000,000.00
28	Komputer Unit	262	2,289,315,111.00
29	Peralatan Komputer	238	657,359,868.98
30	Bangunan Gedung Tempat Kerja	153	100,943,221,741.48
31	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	12	5,979,893,700.00
32	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	1	47,750,000.00
33	Bangunan Menara Perambuan	1	14,387,000.00
34	Jalan	9	2,572,642,790.00
35	Jembatan	1	2,000,000.00
36	Bangunan Air Irigasi	5	1,227,708,270.00
37	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	2	588,899,460.00
38	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	3	319,951,755.00
39	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	3	94,315,375.00

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	JUMLAH HARGA (RP)
40	Bangunan Air Bersih/Air Baku	7	1,341,665,180.00
41	Bangunan Air Kotor	2	193,896,000.00
42	Instalasi Air Bersih / Air Baku	2	6,495,900.00
43	Instalasi Air Kotor	1	105,258,000.00
44	Instalasi Pembangkit Listrik	22	563,044,781.00
45	Instalasi Pengaman	1	15,900,000.00
46	Jaringan Air Minum	2	17,015,000.00
47	Jaringan Listrik	16	409,596,359.00
48	Jaringan Telepon	3	18,097,650.00
49	Bahan Perpustakaan Tercetak	509	27,514,080.00
50	Tanda Penghargaan	14	280,000.00
51	Ternak	126	1,689,515,589.98
52	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	40	2,400,000.00
53	Tanaman	210	176,000,000.20
54	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2	63,369,625.00
TOTAL		3.878	276,266,241,668

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan DIY, 2021)

Sarana prasarana sebagaimana yang tersaji diatas digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.

b. Anggaran

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel I.3. Perbandingan Anggaran Tahun 2019 dan 2020

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
2019	Rp. 24.522.969.872,00	Rp. 41.198.448.425,00	Rp. 65.721.418.297,00
2020	Rp. 25.221.749.995,00	Rp. 19.082.402.673,23	Rp. 44.304.152.668,23

Dana keistimewaan yang di kelola Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun 2020 sejumlah Rp. 1.358.892.800,00. Kegiatan Dais tahun 2020 merupakan kegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman

termasuk ke dalam program Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya. Program ini merupakan program dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menjadi salah satu pelaksana kegiatan yang ada di program tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdapat 11 satker baik Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan yang mengelola dana APBN di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun 2020. Total anggaran dana APBN yang dikelola Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY adalah sebesar Rp. 47.213.061.000,00. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4. Rincian Anggaran APBN DPKP DIY

No	Kode Satker		Total Anggaran (Rp)
1	049025	Dekonsentrasi Hortikultura	3.556.711.000
2	049028	Dekonsentrasi Prasarana dan Sarana Pertanian	981.190.000
3	049037	Dekonsentrasi Ketahanan Pangan	7.160.851.000
4	049058	Dekonsentrasi Perkebunan	804.105.000
5	049059	Dekonsentrasi Tanaman Pangan	3.372.392.000
6	049062	Dekonsentrasi Sumberdaya Manusia Pertanian	5.050.825.000
7	049087	Tugas Pembantuan Tanaman Pangan	15.086.199.000
8	049088	Tugas Pembantuan Hortikultura	3.935.479.000
9	049089	Tugas Pembantuan Perkebunan	2.449.665.000
10	049090	Tugas Pembantuan Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.532.496.000
11	049094	Tugas Pembantuan Prasarana dan Sarana Pertanian	6.783.638.000
TOTAL			54.713.551.000

(Sumber: *monev.anggaran.kemenkeu.go.id*)

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2019

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur DIY Nomor: 700/00873 tanggal 13 Maret 2020, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pada tahun anggaran berikutnya diharapkan mempertahankan kinerja yang sudah sangat baik, namun demikian masih ada tindakan perbaikan yaitu pada pencapaian sasaran/kinerja organisasi terutama pada kinerja yang dilaporkan (<i>output</i>).	<p>Sebagai pengampu urusan pertanian dan pangan di DIY saat ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam rangka menindak lanjuti Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP tahun 2019 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2019 melakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja.</p> <p>Tindak lanjut terkait dengan capaian sasaran/kinerja organisasi dilaporkan (<i>output</i>), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY telah melakukan koordinasi internal, Kepala beserta seluruh karyawan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY telah berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan terkait capaian sasaran/kinerja organisasi dengan cara mempersiapkan dokumen perencanaan dengan lebih baik, memonitor pelaksanaan kegiatan, dan mengadakan evaluasi atas pencapaian <i>output</i> dan kinerja utama secara periodik.</p>

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2020
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2020 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak pandemi Covid-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui review/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017-2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017–2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan sesuai dengan RPJMD Tahun 2017-2022 masuk dalam misi pertama yaitu **“Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban”** dengan tujuan **“Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan**

serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta”. Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang akan mendukungnya adalah:

- 1) Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- 2) Terwujudnya ketahanan pangan;
- 3) Pemenuhan pangan masyarakat.

Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD 2017-2022 dan analisis isu strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan, maka Sasaran, dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah yang hendak dicapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dalam kurun waktu 2017- 2022 adalah:

Tabel II.1. Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2017-2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline (2016/2017)	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultur, perkebunan dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Juta rupiah) <i>(Sumber BPS)</i>	Juta Rupiah	6.903.079	7.041.831	7.112.249	7.183.372	7.255.205	7.327.757	7.327.757
2.	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	88,5	89,92	90,22	90,52	90,82	91,12	91,12
3.	Pemenuhan pangan masyarakat	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	%	40,52	N/A	40,29	39,74	39,19	38,65	38,65

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2. Strategi dan Arah Kebijakan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dan mengamankan produksi komoditas utama dan unggulan daerah; 2. Meningkatkan mutu produk tanaman pangan hortikultura berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan; 3. Memperkuat kelembagaan petani dan memberdayakan petani dalam melakukan agribisnis produk unggul pertanian untuk meningkatkan akses petani terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM petani; 4. Meningkatkan penggunaan aplikasi teknologi pertanian oleh masyarakat; 5. Mengembangkan potensi ternak lokal; 6. Mengembangkan kawasan berbasis komoditas unggulan; 7. Membangun sentra-sentra pembibitan ternak lokal; 8. Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan; 9. Mengembangkan teknologi produksi pertanian domestik melalui penerapan <i>Good Agriculture Practices (GAP)/Standard Operating Procedure (SOP)</i>; 10. Mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), mengendalikan penyakit hewan menular strategis dan menangani dampak bencana alam dan perubahan iklim untuk mengamankan produksi pertanian; 11. Menyediakan sarana prasarana (pupuk, benih, bahan pengendalian OPT, alsintan, sumber daya air, dan permodalan); 12. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui penerapan <i>Good</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi tanaman dan populasi ternak yang berdampak bagi peningkatan pendapatan petani; 2. Peningkatan daya saing produk pertanian melalui standarisasi produk dan proses, peningkatan rantai pasok, mutu dan keamanan pangan; 3. Pengembangan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana); 4. Pengembangan kawasan yang berdampak terhadap pendapatan petani; 5. Pengembangan sentra-sentra pembibitan ternak lokal; 6. Pendampingan dan pengawalan kelompok. 7. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh, pemantapan kelembagaan penyuluhan, dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p><i>Handling Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP), Good Distribution Practices (GDP) dan Good Marketing/Retail Practices (GRP);</i></p> <p>13. Mempromosikan dan memasarkan produk pertanian di pasar domestik maupun internasional;</p> <p>14. Melindungi petani melalui regulasi subsidi harga produk;</p> <p>15. Memfasilitasi prasarana dan sarana penyediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);</p> <p>16. Menumbuhkembangkan minat generasi muda bekerja di sektor pertanian melalui penumbuhan wirausahawan muda pertanian, pemberian modal usaha bagi generasi muda yang bergerak di sektor pertanian, pendidikan dan latihan khusus pertanian/agribisnis pertanian bagi generasi muda;</p> <p>17. Mengembangkan kemitraan antar poktan/gapoktan/lembaga petani dengan pihak ketiga dalam membangun rantai pasokan (<i>supply chain management</i>);</p>	
2.	Terwujudnya ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan, akses, konsumsi, dan keamanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan ketersediaan dan kewaspadaan pangan melalui koordinasi lintas sektor 2. Peningkatan cadangan pangan daerah (masyarakat dan pemerintah) 3. Peningkatan diversifikasi/penganeekaragaman pangan berbasis pangan lokal 4. Penanganan keamanan pangan, pengawasan pangan beredar, dan sertifikasi/registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan 5. Pengembangan distribusi pangan yang merata dan terjangkau, stabilisasi harga pangan strategis, dan pemantauan distribusi, harga, akses pangan. 6. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pusat Perbenihan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3.	Pemenuhan pangan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan	1. Penurunan jumlah Desa Rawan Pangan 2. Peningkatan aksesibilitas pangan masyarakat 3. Pemenuhan kecukupan pangan masyarakat

2.3. Struktur Program dan Kegiatan 2020

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pangan DIY tahun 2020 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2020

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1. Meningkatkan produksi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan	1.1. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	8.688.304.700	3.052.579.775	(5.635.724.925)
	1.1.1. Budidaya Tanaman Pangan	2.425.305.000	871.551.000	(1.553.754.000)
	1.1.2. Pertanian Terpadu Jogja Agro Techno Park	6.199.999.700	2.168.213.775	(4.031.785.925)
	1.1.3. Standarisasi Mutu Produk Pertanian dan Pemasaran Hasil Tanaman	63.000.000	12.815.000	(50.185.000)
	1.2. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA	617.385.280	182.234.580	(435.150.700)
	1.2.1. Budidaya Tanaman Hortikultura	542.132.780	153.922.080	(388.210.700)
	1.2.2. Standarisasi Mutu Produk Pertanian dan Pemasaran Hasil Hortikultura	75.252.500	28.312.500	(46.940.000)
	1.3. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN	968.185.250	256.210.250	(711.975.000)
	1.3.1. Budidaya Tanaman tembakau (Cukai)	203.520.000	86.928.500	(116.591.500)
	1.3.2. Kelembagaan Petani tembakau (cukai)	53.040.000	1.330.500	(51.709.500)
	1.3.3. Budidaya Tanaman Perkebunan	486.958.250	104.821.250	(382.137.000)
	1.3.4. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman	224.667.000	63.130.000	(161.537.000)

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Perkebunan			
	1.4. PROGRAM PENINGKATAN POPULASI PETERNAKAN	2.700.425.000	582.397.000	(2.118.028.000)
	1.4.1. Budidaya Peternakan	1.963.205.000	13.567.000	(1.949.638.000)
	1.4.2. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	650.710.000	564.696.000	(86.014.000)
	1.4.3. Pengamanan Produk Pangan Asal Hewan	86.510.000	4.134.000	(82.376.000)
	1.5. PROGRAM PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN	3.593.998.560	3.418.724.000	(175.274.560)
	1.5.1. Produksi Bibit Ternak	3.219.832.560	3.061.048.000	(158.784.560)
	1.5.2. Pengujian Penyakit Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan	374.166.000	357.676.000	(16.490.000)
	1.6. PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN PENYULUHAN	526.894.480	129.266.480	(397.628.000)
	1.6.1. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	186.157.000	78.385.500	(107.771.500)
	1.6.2. Pelatihan SDM Pertanian	340.737.480	50.880.980	(289.856.500)
	1.7. PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN	244.751.000	244.731.000	(20.000)
	1.7.1. Pengendalian OPT Tanaman Pertanian	215.400.000	215.400.000	0
	1.7.2. Penyediaan Data dan Informasi Perlindungan Tanaman Pertanian	29.351.000	29.331.000	(20.000)
	1.8. PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERTANIAN	1.821.468.750	1.532.137.925	(289.330.825)
	1.8.1 Produksi Benih Tanaman Pangan	968.540.000	895.998.725	(72.541.275)
	1.8.2 Produksi Benih Tanaman Hortikultura	722.331.000	538.914.250	(183.416.750)
	1.8.3 Produksi Benih Tanaman Perkebunan	130.597.750	97.224.950	(33.372.800)
	1.9. PROGRAM PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN	41.114.800	19.858.800	(21.256.000)
	1.9.1 Sertifikasi Perbenihan Tanaman Pertanian	26.134.800	15.926.800	(10.208.000,00)
	1.9.2 Pengawasan	14.980.000	3.932.000	(11.048.000,00)

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Perbenihan Tanaman Pertanian			
	Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 1	19.202.527.820	9.418.139.810	(9.784.388.010)
2. Terwujudnya ketahanan pangan	2.1. PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN	1.452.694.250	1.057.962.500	(394.731.750)
	2.1.1. Penyediaan Cadangan Pangan	267.867.250	654.805.000	386.937.750
	2.1.2. Distribusi Pangan Masyarakat	410.200.000	148.533.000	(261.667.000)
	2.1.3. Penyelenggaraan Jogja Benih	57.963.000	16.640.500	(41.322.500)
	2.1.4. Pengawasan Keamanan Pangan	87.484.000	63.114.000	(24.370.000)
	2.1.5. Gerakan Penganekaragaman Pangan	629.180.000	174.870.000	(454.310.000)
	Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 2	1.452.694.250	1.057.962.500	(394.731.750)
3. Pemenuhan pangan masyarakat	3.1. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAERAH RAWAN PANGAN	309.590.000	101.693.500	(207.896.500)
	3.1.1. Penanganan Desa Rawan Pangan	242.750.000	78.388.000	(164.362.000)
	3.1.2. Analisis Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan	66.840.000	23.305.500	(43.534.500)
	Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 3	309.590.000	101.693.500	(207.896.500)
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		20.964.812.070	10.577.795.810	(10.387.016.260)

Tabel II.4. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2020

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	Program Administrasi Perkantoran	4.755.563.580	4.202.082.803	(553.480.777)
	1.1. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.090.533.080	2.527.174.297	436.641.217
	1.2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.272.084.500	1.230.362.506	(41.721.994)
	1.3. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.392.946.000	444.546.000	(948.400.000)
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.824.780.700	2.863.727.260	(5.961.053.440)
	3.1. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	2.626.200.000	126.163.460	(2.500.036.540)

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	3.2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	114.510.700	85.167.800	(29.342.900)
	3.3. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	147.900.000	0	(147.900.000)
	3.4. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.007.460.000	687.375.000	(320.085.000)
	3.5. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	175.000.000	77.325.000	(97.675.000)
	3.6. Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan sarana pendukungnya (DAK)	563.355.000	0	(563.355.000)
	3.7. Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura serta sarana pendukungnya (DAK)	4.190.355.000	1.887.696.000	(2.302.659.000)
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	30.200.000	15.200.000	(15.000.000)
	a. Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	30.200.000	15.200.000	(15.000.000)
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	171.562.000	64.704.000	(106.858.000)
	4.1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	2.940.000	2.940.000	0
	4.2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	12.000.000	8.080.000	(3.920.000)
	4.3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	127.378.000	44.590.000	(82.788.000)
	4.4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	29.244.000	9.094.000	(20.150.000)
	Total Anggaran Pendukung	13.782.106.280	7.145.714.063	-6.636.392.217

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian

dan Ketahanan Pangan DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.5. Perjanjian Kinerja Kepala DPKP DIY Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (<i>Sumber BPS</i>)	Juta rupiah	7.183.372	Triwulan I	7.112.249
					Triwulan II	7.112.249
					Triwulan III	7.112.249
					Triwulan IV	7.183.372
2.	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,52	Triwulan I	90,22
					Triwulan II	90,22
					Triwulan III	90,22
					Triwulan IV	90,52
3.	Pemenuhan pangan masyarakat	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	Persen	39,74	Triwulan I	40,29
					Triwulan II	40,29
					Triwulan III	40,29
					Triwulan IV	39,74

Pada tahun 2020, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19 serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020. Perjanjian Kinerja (Reviu) Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan Tambahan:

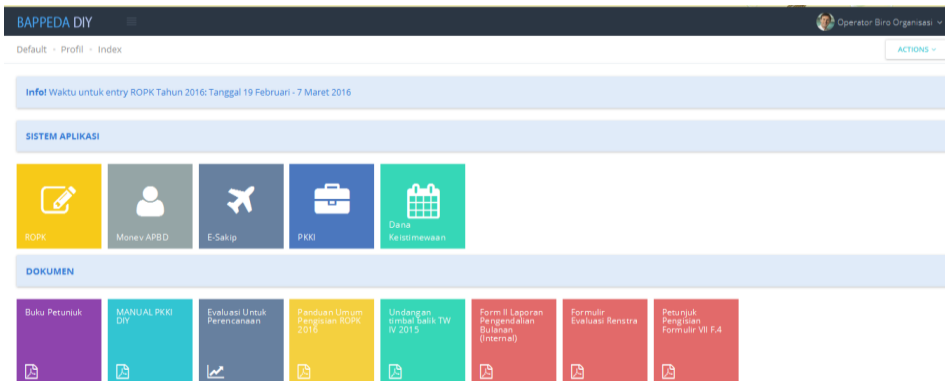
1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang 49,38% sehubungan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19.
2. Data capaian kinerja bersumber dari BPS, Angka Sementara baru dirilis bulan Februari atau Maret tahun berikutnya sehingga capaian akhir tahun menggunakan Angka Prediksi OPD.

3. Pengelolaan dana BTT sebesar Rp. 764.676.000,00 untuk:
 - a. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana untuk Penyimpanan Produk Pertanian.
 - b. Kegiatan Pendistribusian Bahan Makanan.
 - c. Kegiatan Kampanye Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal.
 - d. Kegiatan Pemberdayaan Peternak Sapi Perah.
 - e. Kegiatan Pemberdayaan Peternak Kambing Perah.
 - f. Kegiatan Bimtek Pemanfaatan Pekarangan untuk Budidaya Hortikultura.
 - g. Kegiatan Registrasi Kebun.
4. Pengelolaan dana APBN Dekonsentrasi sebesar Rp 20.926.074.000,00 melalui:
 - a. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.
 - b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.
 - c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
 - d. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan.
 - e. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.
 - f. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian.
5. Pengelolaan dana APBN Tugas Pembantuan sebesar Rp 33.787.477.000,00 melalui:
 - a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.
 - b. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.
 - c. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan.
 - d. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.
 - e. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprovo.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



(Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>)

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2020*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2020

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

(Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2019	TAHUN 2020			KRITERIA / KODE	TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSEN TASE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan	Indikator: Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Juta rupiah) (Sumber BPS) Meta indikator: Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB tahun n (ADHK)	Juta Rupiah	6.903.079	7.006.748,80	7.183.372	7.007.525,4**	97,55	Sangat Baik	7.327.757
2	Terwujudnya ketahanan pangan	Indikator: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Meta indikator: % AKG X Bobot	Skor	88,5	95,5	90,52	94,7	104,62	Sangat Baik	91,12
3	Pemenuhan pangan masyarakat	Indikator: Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan Meta indikator: Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dibagi pengeluaran rata-rata perkapita sebulan total dikali 100% (Data BPS)	Persen	40,52	39,16	39,74	41,08	96,63	Sangat Baik	38,65

***) Angka Sangat Sementara, capaian Tahun 2020 belum dirilis oleh BPS (Data menggunakan angka olahan dengan perhitungan regresi linier terhadap capaian nilai PDRB) (Sumber: BPS DIY diolah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021)

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1: Meningkatnya produksi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan

Kinerja sasaran Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan diukur dengan indikator Nilai Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan dalam PDRB (Sumber BPS). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan.	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Sumber BPS)	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB tahun n (ADHK)

Capaian nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB tahun 2020 saat ini belum dirilis BPS DIY, sehingga perhitungan sementara menggunakan angka proyeksi dengan mengolah data historis BPS DIY untuk nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan selama beberapa tahun sebelumnya. Sebagai data dukung, capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY untuk produksi tanaman pangan tahun 2020 sebesar 2.376.463 ton mengalami kenaikan 16,21% dari tahun 2019, hortikultura tercapai 400.026 ton naik 11,44% dibandingkan tahun sebelumnya, perkebunan tercapai 62.907,17 ton meningkat sebesar 0,59% dari tahun sebelumnya, dan peternakan tercapai 608.473 Animal Unit naik sebesar 4,09% dari tahun 2019. Peningkatan nilai produksi di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan diprediksi memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai PDRB sektor pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020. Pertumbuhan positif sektor pertanian pada masa pandemi tentu memberikan harapan akan kelangsungan produksi pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Capaian sasaran strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan indikator kinerja nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan berdasarkan Permendagri Nomor 89 Tahun 2017 termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

Kinerja sasaran meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dengan indikator nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (Juta Rupiah) pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi**)	% Realisasi		
1	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (Juta Rupiah) (Sumber BPS)	7.006.748,80	7.183.372	7.007.525,4	97,55% [[7.007.525,4/7.183.372) x 100%]	7.327.757	95,63% [[7.007.525,4 / 7.327.757) x 100%]

***)* Angka Sangat Sementara, capaian tahun 2020 belum dirilis oleh BPS (Data menggunakan angka prediksi OPD hasil perhitungan regresi linier terhadap capaian nilai PDRB)

(Sumber: BPS DIY diolah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021)

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan adalah sebagai berikut:

- Indikator kinerja Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Juta rupiah) tercapai 7.007.525,40 (juta rupiah), dengan persentase capaian 97,55% dari target 2020.
- Dibandingkan realisasi tahun lalu, terdapat peningkatan sebesar 0,01%.
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tercapai 95,63%, diproyeksikan indikator kinerja sasaran ini akan berhasil tercapai di akhir periode RPJMD.
- Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 didukung oleh: Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Peningkatan produksi ini didukung oleh program bantuan

berupa sarana dan prasarana serta pendampingan intensif bagi petani sehingga mampu meningkatkan produksi pertanian melalui peningkatan produktivitas. Adanya dukungan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), dukungan program perbenihan tanaman pertanian, dukungan program perbibitan ternak, program pengembangan SDM Pertanian, dan pencegahan serta pengendalian penyakit hewan menular yang baik di wilayah DIY sehingga mendukung peningkatan produksi pertanian.

Perbandingan pencapaian dari tahun 2019 ke tahun 2020 terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.5. Perbandingan PDRB Year on Year (YoY)

No	Indikator Sasaran	PDRB 2019	PDRB 2020**)	Perbandingan PDRB 2020***) terhadap 2019*)	Pertumbuhan Antar Tahun
1	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (Juta Rupiah) (Sumber BPS)	7.006.748,80	7.007.525,4**)	100,01% $\left[\frac{7.007.525,4}{7.006.748,80} \times 100\% \right]$	0,01% $\left[\frac{7.007.525,4 - 7.006.748,80}{7.006.748,80} \times 100\% \right]$

****) Angka Sangat Sementara, capaian tahun 2020 belum dirilis oleh BPS (Data menggunakan angka prediksi OPD hasil perhitungan regresi linier terhadap capaian nilai PDRB)*

(Sumber: BPS DIY diolah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021)

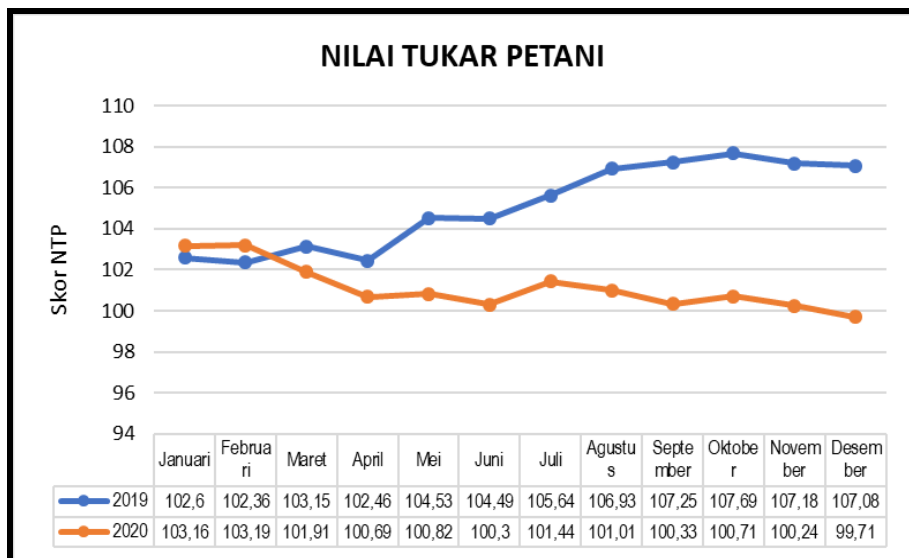
Tabel di atas menunjukkan pencapaian PDRB tahun 2020 sebesar 7.007.525,4 juta rupiah atau tercapai sebesar 97,55% dari target tahun 2020. Perbandingan capaian PDRB tahun 2020 terhadap capaian tahun 2019 sebesar 100,01% atau nilai pertumbuhan antar tahunnya sebesar 0,01%.

Kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi secara agregat yang dapat dihitung melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui PDRB sebagai salah satu indikator yang menunjukkan kemampuan sumberdaya yang dihasilkan suatu daerah. Pertumbuhan PDRB yang positif menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki potensi dan kemampuan

dalam pengembangan sektor perekonomian dan pengolahan sumber daya yang ada.

Selain indikator tersebut, terdapat indikator lain yang tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama namun dapat menggambarkan kinerja pembangunan pertanian di DIY, indikator tersebut adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase, merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Berikut adalah capaian nilai NTP tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, dimana NTP tiap bulan pada tahun 2019 lebih tinggi dibanding nilai NTP pada periode bulan yang sama di tahun 2020. Nilai NTP > 100 menunjukkan bahwa petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya sehingga pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Nilai NTP yang semakin tinggi menunjukkan tingkat kesejahteraan petani yang semakin meningkat.

Gambar III.1. Nilai Tukar Petani Tahun 2019 dan 2020



(Sumber: BPS DIY, 2021)

Berdasarkan Gambar III.1, diketahui bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2020 sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani mengalami

penurunan dibanding tahun 2019. Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 mendorong adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada terhambatnya aktivitas beberapa sektor. Hal ini berimplikasi melemahkan daya beli dan konsumsi masyarakat. Selain itu, kebijakan PSBB juga turut mempengaruhi kelancaran distribusi komoditas pangan antarkota, antarprovinsi, dan antarpulau. Sisi positif terjadinya pandemi di tahun 2020 adalah masyarakat yang banyak beraktivitas di rumah memiliki waktu lebih dan mendorong lahirnya *trend* budidaya pertanian di lahan pekarangan, hal ini dapat menjadi solusi dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan keluarga secara mandiri.

Rata-rata NTP tahun 2020 sebesar 101,13 artinya usaha pertanian masih mampu memberikan tambahan kesejahteraan bagi para petani. Produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan meningkat di tahun 2020, namun beberapa komoditas mengalami hambatan dalam pemasarannya. Walaupun sudah ada upaya untuk memasarkan produk pertanian secara daring namun belum mampu menyerap seluruh produk yang dihasilkan. Permintaan akan produk pertanian di DIY yang merupakan sentra wisata dan pendidikan juga dipengaruhi oleh kondisi pandemi saat ini, daya serap terhadap produk pertanian menurun karena kebijakan sekolah/kuliah masih menggunakan metode daring belum ada tatap muka pelajaran di kelas sehingga jumlah pelajar dan mahasiswa indekos menurun drastis; usaha sektor pariwisata serta hotel-restoran-kafe (horeka) juga menurun tajam; aktivitas sosial, hajatan, dan pesta di masyarakat sangat terbatas sehingga permintaan konsumen terhadap produk pertanian juga mengalami penurunan. Dengan kondisi ini, walaupun produksi naik namun nilai barang yang diterima petani lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

Tabel III.6. Capaian Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2020

No.	Program	Indikator Sasaran	Kinerja		
			Target	Realisasi**	% Realisasi
1	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi tanaman pangan (ton)	2.313.050	2.376.463	102,74
2	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi hortikultura (ton)	399.550	400.026	100,12
3	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Perkebunan (ton)	69.015	62.907,17	91,15
4	Program Peningkatan Populasi Peternakan	Populasi ternak (Animal Unit (AU)	624.874	606.784	93,85
5	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Penyuluhan	Tingkat pengetahuan dan ketrampilan SDM pertanian (nilai/skor)	74	73,4	99,19
6	Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Jumlah sertifikasi benih	700	707	101

No.	Program	Indikator Sasaran	Kinerja		
			Target	Realisasi**	% Realisasi
		tanaman pangan dan hortikultura (hektar)			
7	Program Perlindungan Tanaman Pertanian	Persentase pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI (%)	95	96,57	101,65
8	Program Pengembangan Perbenihan	Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura bersertifikat yang terdistribusi (%)	87	87,79	100,91
9	Program Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan	Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)	94	112	119,15

Keterangan: ** Angka Sangat Sementara

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021)

Capaian sasaran strategis sangat dipengaruhi oleh capaian produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Berdasarkan tabel di atas, realisasi produksi tanaman pangan di tahun 2020 sebesar 2.376.463 ton atau terealisasi sebesar 102,74% dari target yang ditetapkan 2.313.050 ton. Pencapaian target dihitung dari nilai produksi dalam satuan ton (produksi (ton) = luas panen (ha) x produktivitas (ton/ha)) dan menjumlahkan hasil produksi tanaman pangan selama 1 tahun menggunakan Angka Sementara dengan rincian:

Tabel III.7. Produksi Tanaman Pangan di D.I. Yogyakarta 2019-2020**

No.	Komoditas	Produksi (Ton)		
		2019	2020**	% Pertumbuhan
1	Padi	810.980,00	848.504,00	4,63
3	Jagung	366.031,00	369.301,00	0,89
4	Kacang Kedelai	5.041,00	7.997,00	58,64
5	Kacang Hijau	80.682,00	75.045,00	-6,99
6	Kacang Tanah	226,00	533,00	135,84
7	Ubi Kayu	778.806,00	1.072.317,00	37,69
8	Ubi Jalar	3.149,00	2.766,00	-12,16
9	Sorghum	23,00	-	-100,00
Jumlah		2.044.938,00	2.376.463,00	16,21

Keterangan: ** Angka Sangat Sementara

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021)

Produksi tanaman pangan tahun 2020 sebesar 2.376.463 ton, mengalami kenaikan sebesar 16,21% dari tahun 2019. Produksi Gabah Kering Giling (GKG) padi total naik dari tahun 2020 sebesar 4,63%. Rata-rata komoditas tanaman pangan mengalami kenaikan produksi dikarenakan adanya dukungan program APBN Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian diantaranya berupa bantuan benih kedelai, pupuk hayati cair (*rhizobium*), herbisida dan pestisida dalam kegiatan pengembangan kawasan kedelai seluas 4.174 Ha, pengadaan benih kacang tanah seluas 200 Ha di Bantul, bantuan benih kacang hijau dan pupuk hayati cair dalam kegiatan pengembangan kawasan kacang hijau seluas 200 Ha, bantuan budidaya padi khusus berupa benih kedelai dan pupuk seluas 137 Ha, pengadaan benih padi inbrida seluas 9.812 Ha, pengadaan benih jagung hibrida seluas 7.500 Ha, serta bantuan perlindungan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim.

Tabel III.8. Produksi Hortikultura di D.I. Yogyakarta 2019-2020**

No.	Komoditas	Produksi (Ton)		
		2019	2020**	% Pertumbuhan
1	Pepaya	8.376	13.995	67,08
2	Pisang	47.554	66.729	40,32
3	Cabai Besar	32.933	44.535	35,23
4	Cabai Rawit	10.040	15.052	49,92
5	Salak	41.120	54.995	33,74
6	Bawang Merah	16.998	19.236	13,17

*Keterangan: ** Angka Sangat Sementara*

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021)

Produksi hortikultura tahun 2020 sebesar 400.026 ton atau tercapai 100,12% dari target tahun 2020 yaitu 399.550 ton. Beberapa komoditas hortikultura mengalami peningkatan seperti pepaya meningkat 67,08%, pisang meningkat 40,32%, cabai besar meningkat 35,23%, cabai rawit meningkat 49,92%, salak meningkat 33,74%, dan bawang merah meningkat 13,17% dari tahun 2019. Peningkatan produksi hortikultura didukung oleh pendanaan APBN Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Hortikultura dan APBD melalui fasilitasi dukungan peningkatan produksi hortikultura dan budidaya pengembangan lahan surjan melalui Dana Keistimewaan.

Tabel III.9. Produksi Perkebunan di D.I. Yogyakarta 2019-2020**

No	Komoditas	Produksi (Ton)			Wujud Produksi
		2019	2020**	% Pertumbuhan	
1	Kelapa	48.065,92	47.403,55	-1,38	Kopra
2	Tebu	9.425,97	9.697,80	2,88	gula hablur
3	Kakao	1.792,47	1.962,05	9,46	biji kering
4	Cengkeh	705,54	851,50	20,69	bunga kering
5	Tembakau Rakyat	692,89	1.001,13	44,49	daun kering
6	Kopi	512,56	533,68	4,12	biji kering
7	Jambu Mete	233,55	260,14	11,39	biji kering
8	Teh	219,01	242,19	10,58	daun kering

*Keterangan: ** Angka Sangat Sementara*

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021)

Produksi perkebunan tahun 2020 sebesar 62.907,17 ton atau tercapai 91,15% dari target tahun 2020 yaitu 69.015 ton. Capaian ini meningkat dari tahun 2019 sebesar 62.537,59 ton dan di tahun 2020 sebesar 62.907,17 ton mengalami peningkatan sebesar 0,59%. Hal ini didukung oleh peningkatan beberapa komoditas yaitu produksi gula hablur tebu meningkat 2,88%, biji kering kakao meningkat 9,46%, bunga kering cengkeh meningkat 20,69%, daun kering tembakau meningkat 44,49%, biji kopi kering meningkat 4,12%, biji mete kering meningkat 11,39%, dan daun teh kering meningkat 10,58%. Produksi kelapa mengalami penurunan 1,38% dikarenakan tanaman yang dikembangkan sejak tahun 1990-an saat ini sudah tua atau tidak produktif. Adanya hama kutu putih pada kelapa di Kokap, Kulon Progo juga turut menjadi penyebab penurunan produksi. Peningkatan produksi komoditas perkebunan juga didukung oleh kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) yang cukup berpengaruh pada peningkatan produktivitas per tanaman perkebunan. Selain itu, kegiatan Sekolah Lapang dan Bimbingan Teknis Lapangan juga memberikan dukungan terhadap peningkatan kapasitas kemampuan petani/pekebun dalam kegiatan pemeliharaan tanaman perkebunan. Nilai Tukar Petani Perkebunan Tahun 2020 rata-rata 104,36, dimana NTP>100 menunjukkan bahwa sub sektor perkebunan mampu dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi petani yang cukup menjanjikan.

Populasi peternakan tahun 2020 sebesar 606.060 Animal Unit atau tercapai 96,99% dari target tahun 2020 yaitu 624.874 Animal Unit. Populasi peternakan mengalami peningkatan sebesar 3,68% dari tahun sebelumnya. Peningkatan populasi terjadi di beberapa jenis ternak seperti sapi potong meningkat 1,59%, kambing meningkat 2,25%, domba meningkat 2,94%, dan ayam petelur meningkat 29,45% dari tahun 2019. Peningkatan populasi ternak didukung oleh kegiatan optimalisasi reproduksi/SIKOMANDAN berupa fasilitasi sarana dan prasana serta operasional, kegiatan pengendalian betina produktif, dukungan pembiayaan KUR dari lembaga perbankan, dukungan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari beberapa BUMN, kemajuan teknologi budidaya ayam ras pedaging dan petelur, kegiatan optimalisasi reproduksi berupa fasilitasi sarana dan prasana serta operasional, dan dukungan/aplikasi teknologi peternakan dari hulu sampai hilir.

3.1.2. Sasaran 2: Terwujudnya ketahanan pangan

Kinerja sasaran Terwujudnya Ketahanan Pangan diukur dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III. 10. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2

No (1)	Sasaran (2)	Indikator (3)	Meta Indikator (4)
1	Terwujudnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	% AKG X Bobot

Capaian dihitung menggunakan data dari tabel konsumsi hasil SUSENAS BPS dengan menggunakan aplikasi penghitungan Skor PPH yang disediakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Berikut adalah capaian Skor PPH tahun 2020:

Tabel III.11. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target (skor)	Realisasi (skor)	% Realisasi		
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95,5	90,52	94,7**	104,62	91,12	103,93

*Keterangan: ** Angka Sangat Sementara*

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021)

Analisis Ketercapaian Sasaran Terwujudnya Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan tercapai 94,7% melebihi target tahun 2020 dengan persentase capaian 104,62%.
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu, terdapat penurunan 0,08 skor atau -0,84%
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tercapai 103,93%, dengan upaya yang berkesinambungan capaian ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan sampai akhir periode RPJMD.
- d. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 2 didukung oleh:

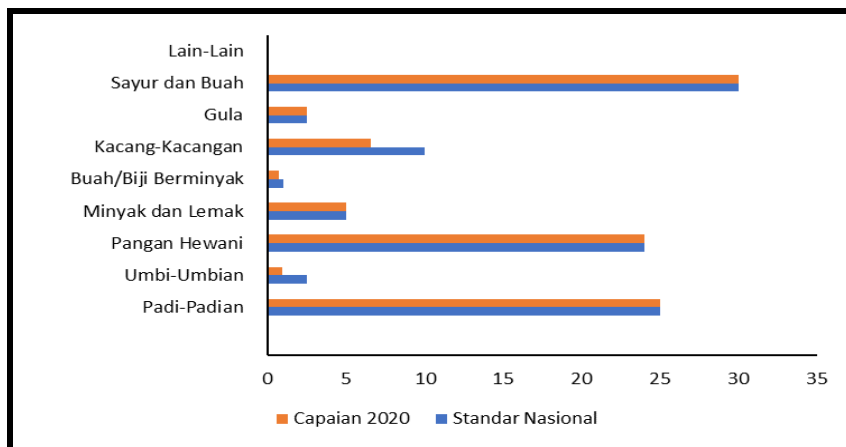
Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi dengan baik dengan adanya koordinasi intensif dengan para pihak terkait untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang mencukupi. Sampai dengan tahun 2020, jumlah cadangan pangan pemerintah berupa beras telah mencapai 275,04 ton. Cadangan pangan pemerintah dan masyarakat terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui pengadaan tiap tahunnya. Cadangan pangan sangat berguna ketika terjadi kerawanan maupun krisis pangan dan bencana. Distribusi dan akses pangan juga terus ditingkatkan. Harga pangan pokok di DIY relatif terkendali dengan adanya dukungan Tim Pemantau dan Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Harga pokok dipantau secara rutin dan apabila perlu dilakukan operasi pasar untuk pengendalian harga. Meningkatnya Skor PPH juga didukung dengan adanya gerakan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) serta usaha pemberdayaan wanita melalui pemanfaatan pekarangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari).

Selain penganekaragaman konsumsi pangan, aspek keamanan pangan juga penting untuk diperhatikan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang semakin meningkat, menunjukkan konsumsi masyarakat yang semakin beragam jenisnya dan semakin bergizi asupannya.

Dari data yang diolah menggunakan aplikasi dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Skor PPH DIY tahun 2020 sebesar 94,7% atau tercapai 104,62% dari target tahun 2020 yaitu 90,52%. Ke depannya masyarakat masih perlu didorong untuk meningkatkan beberapa golongan pangan yakni umbi-umbian, buah/biji berminyak dan kacang-kacangan karena tingkat konsumsinya masih di bawah standar yang dianjurkan.

Gambar III.2 Grafik Perbandingan Skor PPH Standar dan Capaian Skor PPH DIY Tahun 2020 (Angka Sangat Sementara)**



(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2021)

Keberhasilan pencapaian sasaran terwujudnya ketahanan pangan didukung oleh pencapaian program Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel III.12. Capaian Program yang Mendukung Pencapaian
Sasaran 2 Strategis Tahun 2020**

No.	Program	Indikator Sasaran	Kinerja		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	Program peningkatan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan	Persentase Peningkatan Ketersediaan dan Konsumsi Energi	0,08	-0,52**	-650,00

*Keterangan: ** Angka Sangat Sementara*

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021)

Indikator Peningkatan Ketersediaan dan Konsumsi Energi dihitung dari rata-rata peningkatan angka ketersediaan energi dan peningkatan angka konsumsi energi antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Angka ketersediaan energi diperoleh dari Neraca Bahan Makanan yang disusun oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY bersama dengan beberapa instansi terkait sebagai penyedia data untuk penghitungan, sedangkan angka konsumsi energi merupakan *output* lain yang dihasilkan pada saat penghitungan Skor PPH menggunakan data SUSENAS BPS. Capaian angka ketersediaan energi tahun ini sebesar 3.734 kkal/kap/hari atau naik 0,08% dibanding capaian tahun sebelumnya 3.731 kkal/kap/hari. Capaian angka konsumsi energi tahun ini sebesar 2.199 kkal/kap/hari atau turun -1,12% dibanding capaian tahun sebelumnya 2.224 kkal/kap/hari. Jika dirata-rata maka capaian kinerja keduanya menjadi -0,52%. Capaian ini diperoleh dari total persentase peningkatan angka ketersediaan energi dan konsumsi energi di tahun 2019 sebesar $(0,08\% + (-1,12\%))/2$ yaitu sebesar -0,52%.

Dibandingkan standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2018, tingkat konsumsi energi DIY sudah di atas standar rata-rata (2.100 kkal/kapita/hr). Terjadinya penurunan konsumsi energi juga tidak selalu berimplikasi negatif karena semakin mendekati standar rata-rata konsumsi ideal sebesar 2.100 kkal/kapita/hr. Penurunan konsumsi energi utamanya disumbang oleh kelompok padi-padian. Hal ini sesuai dengan tujuan program pemerintah terkait diversifikasi/penganekaragaman pangan lokal yang bersumber dari bahan non padi-padian.

Skor PPH tercapai dengan dukungan dari terselenggaranya 3 sub sistem ketahanan pangan yaitu: 1). ketersediaan, dimana capaian angka

ketersediaan energi tahun 2020 sebesar 3.734 kkal/kap/hari yang melebihi standar anjuran Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) 2.400 kkal/kap/hari, jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebanyak 275,04 ton; 2). keterjangkauan/distribusi, dengan terjaganya stabilisasi harga pangan pokok strategis melalui fasilitasi untuk Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/ Toko Tani Indonesia (TTI), Toko Tani Indonesia Center (TTIC); dan 3). konsumsi serta keamanan pangan, terlaksana melalui gerakan penganekaragaman pangan, konsumsi pangan lokal, Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), dan sertifikasi/registrasi PSAT.

3.1.3. Sasaran 3: Pemenuhan pangan masyarakat

Kinerja sasaran Pemenuhan Pangan Masyarakat diukur dengan indikator Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan untuk Makanan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III. 13. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3

No (1)	Sasaran (2)	Indikator (3)	Meta Indikator (4)
1	Pemenuhan Pangan Masyarakat	Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan untuk Makanan	Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dibagi pengeluaran rata-rata perkapita sebulan total dikali 100% (Data BPS)

Capaian persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan belum dirilis BPS, sehingga angka capaian menggunakan angka prediksi OPD dari hasil regresi linier terhadap data beberapa tahun sebelumnya. Data disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.14. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target (persen)	Realisasi (Persen)	% Realisasi		
1.	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	39,16	39,74	41,08**	96,63	38,65	93,71

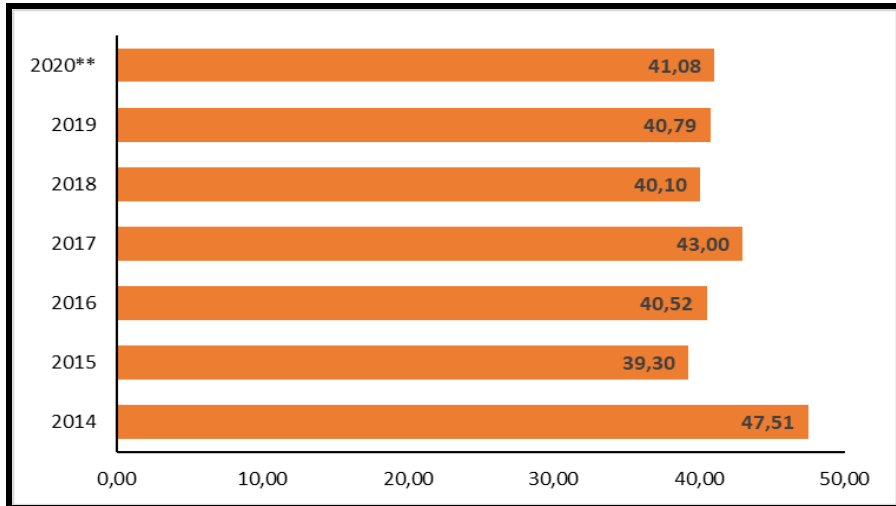
Keterangan: ** Angka Sangat Sementara

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021)

Analisis Ketercapaian Sasaran Pemenuhan Pangan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan tercapai 41,08%, persentase capaian 96,63% dari target 2020.
- b. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tercapai 93,71%, diproyeksikan indikator kinerja sasaran ini akan berhasil tercapai di akhir periode RPJMD.
- c. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 3 didukung oleh upaya penanganan kerawanan pangan dan penurunan kemiskinan di DIY yang terus dilaksanakan secara lintas sektor dengan optimalisasi program kegiatan dari dana BTT maupun APBN.

Gambar III.3. Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan untuk Makanan Tahun 2014-2020 (Angka Sangat Sementara)**



(Sumber: BPS DIY diolah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2021)

Melihat *trend* capaian persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dalam periode 5 tahun ke belakang cukup fluktuatif, antar tahun ada yang mengalami kenaikan ada pula yang menurun. Namun jika dihitung menggunakan metode regresi linier dengan asumsi *ceteris paribus*, ada kecenderungan meningkat, angka perkiraan tahun 2020 sebesar 41,08%.

Kondisi ekonomi yang melemah di masa pandemi ini dapat berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat dan jika ditinjau dari teori di Hukum Engel apabila pendapatan masyarakat menurun maka pengeluaran untuk makanan akan meningkat. Ditambah data hasil survei yang dilakukan Komite Nasional Pengendalian Tembakau, tingkat konsumsi rokok cenderung meningkat selama masa pandemi ini (rokok juga masuk dalam golongan pengeluaran untuk makanan). Dengan pertimbangan asumsi tersebut maka diprediksi indikator kinerja ini akan mengalami peningkatan dibanding tahun 2019.

Tercapainya sasaran didukung oleh capaian program pada sasaran ini yakni:

**Tabel III.15. Capaian Program yang Mendukung Pencapaian
Sasaran 3 Strategis Tahun 2020**

No.	Program	Indikator Sasaran	Kinerja		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	Program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan	4	4	100

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2021)

Berdasarkan hasil pemetaan desa rawan pangan dengan indikator ketersediaan pangan, kemiskinan dan gizi buruk tahun 2020 berjumlah 4 desa. Adapun target jumlah desa rawan pangan pada tahun 2020 sebanyak 4 desa, sehingga jika dibandingkan dengan target telah tercapai 100% dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 jumlah desa rawan pangan di DIY tetap (tidak ada peningkatan maupun penurunan). Empat desa rawan pangan yang tersisa di DIY sampai dengan tahun 2020 adalah: (1) Desa Kalirejo, Kokap, Kulon Progo; (2) Desa Kebonharjo, Samigaluh, Kulon Progo; (3) Desa Banjarsari, Samigaluh Kulon Progo; dan (4) Desa Tegalrejo, Gedangsari, Gunungkidul. Keempat desa rawan pangan tersebut penyebabnya lebih besar karena indikator kemiskinan. Untuk mencapai target RPJMD tahun 2022 DIY bebas dari desa rawan pangan maka diperlukan kerjasama yang sinergis dengan para pihak terkait agar permasalahan kemiskinan di desa-desa tersebut dapat diselesaikan secara tuntas.

3.2. Realisasi Anggaran

Berdasarkan tabel III.16, dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait pencapaian sasaran sebesar Rp. 10.577.795.810,24 terealisasi Rp. 10.247.078.121,00 atau 96,87%. Sisa anggaran sebesar Rp. 330.717.689,00 atau 3,13% antara lain bersumber dari:

- Beberapa kegiatan yang sedianya dilaksanakan di Triwulan 1 ada yang tidak bisa dilaksanakan karena terkendala pandemi dan tidak dapat dihilangkan atau direalokasikan untuk kegiatan lain pada saat APBD Perubahan karena SPD Triwulan 1 sudah terbit.

- Tidak teralisasinya perjalanan dinas luar daerah dikarenakan adanya pandemi Covid-19.
- Sisa pengadaan barang dan jasa.
- Ada 3 kelompok calon penerima hibah yang tidak dapat direalisasikan, 2 kelompok karena kesalahan penulisan alamat dan 1 kelompok sudah mendapatkan hibah dari sumber pendanaan yang lain.

Meskipun belanja tidak terserap 100% namun target 1 sasaran strategis OPD dapat tercapai diatas 100% dan 2 sasaran strategis lainnya tercapai diatas 95% sehingga capaian semuanya termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

Tabel III.16. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Juta rupiah) (Sumber BPS)	7.183.372	7.007.525.40	97.55	9.418.139.810,24	9.138.708.371,00	97,03
2	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90.52	94.7	104.62	1.057.962.500,00	1.016.403.750,00	96,07
3.	Pemenuhan pangan masyarakat	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	39.74	41.08	103.37	101.693.500,00	91.966.000,00	90,43
Jumlah						10.577.795.810,24	10.247.078.121,00	96,87
Program pendukung						7.145.714.062,99	6.276.207.849,00	87,83
Total Belanja Langsung						17.723.509.873,23	16.523.285.970,00	93,23

(Sumber: sengguh.jogjaprovo.go.id/s2020/monev-laporan/laporan)

3.3. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara

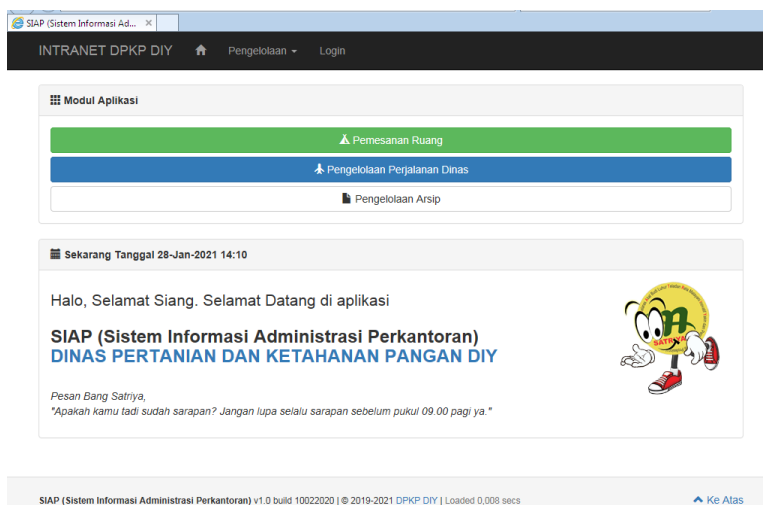
langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

Sistem Informasi Administrasi Perkantoran (SIAP) merupakan sistem di jaringan lokal (intranet) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Sistem ini bertujuan untuk:

1. Pengelolaan arsip
2. Pengelolaan penggunaan ruang rapat yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
3. Memudahkan pengelolaan perjalanan dinas agar tidak terjadi duplikasi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas pada tanggal yang sama.

Sistem ini merupakan program inisiatif dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY karena pada setiap tahun selalu muncul temuan SPJ perjalanan dinas saat pemeriksaan oleh Inspektorat DIY, yakni pada satu hari ada personil yang sama pergi ke lokasi berbeda. Penggunaan aplikasi SIAP dalam implementasinya dapat meningkatkan akuntabilitas karena perjalanan dinas terhindar dari duplikasi, penghematan kertas, serta bisa menyeragamkan format SPJ.

Gambar III.4. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkantoran (SIAP)



BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY di antaranya:
 - a. Urusan Pertanian
 - Sebagian produk pertanian mengalami kesulitan pemasaran akibat permintaan yang berkurang.
 - Dampak pemanasan global yang memicu perubahan iklim.
 - Regenerasi petani masih sulit dilakukan.
 - Pengendalian alih fungsi lahan pertanian.
 - b. Urusan Pangan
 - Melemahnya perekonomian di DIY dapat memicu beralihnya preferensi konsumsi pangan masyarakat. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) DIY yang menunjukkan keberagaman konsumsi pangan masyarakatnya saat ini sudah melebihi angka 90, hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan.
 - Beban ganda keamanan pangan:
 - 1) produsen/pelaku usaha belum sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan dalam proses produksinya begitu juga konsumen belum seluruhnya paham terkait pentingnya keamanan pangan.
 - 2) Produsen/pelaku usaha menghadapi berbagai isu keamanan pangan yang selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Industri pangan yang berorientasi ekspor juga menghadapi tantangan berat terkait perbedaan standar mutu dan keamanan pangan antar negara yang satu dengan negara lainnya.

- Masih terdapat 4 (empat) desa rawan pangan di DIY sampai dengan tahun 2020. Indikator yang mempengaruhi adalah akses pangan yang disebabkan oleh faktor kemiskinan.
2. Adapun yang sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu:
- a. Urusan Pertanian
 - Mendorong para petani dan pelaku usaha pertanian untuk mengoptimalkan pemasaran produknya secara daring antara lain dengan memanfaatkan keberadaan Pasar Mitra Tani (d/h Toko Tani Indonesia Center) di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, *markethub* SIBAKUL yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY, maupun berbagai aplikasi pemasaran lain yang sudah ada.
 - Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para petani dalam hal mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.
 - Mendorong digitalisasi pertanian mulai dari hulu sampai dengan hilir sebagai salah satu upaya untuk menarik minat generasi muda berusaha di sektor pertanian. Selain itu juga dengan meningkatkan pelatihan manajemen dan kewirausahaan pertanian utamanya dalam hal penggunaan teknologi tepat guna untuk menunjang proses produksi.
 - Review Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) sudah dilaksanakan di tahun 2020, harapannya di tahun 2021 sudah ditetapkan. Tahun 2021 DPKP DIY juga sudah menganggarkan penyusunan Pergub turunan dari Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai upaya pendukung percepatan implementasi PLP2B di DIY.
 - b. Urusan Pangan
 - Meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan promosi pola konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dengan menggunakan berbagai media, terutama media sosial yang banyak dan mudah diakses oleh masyarakat.
 - Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha tentang pentingnya keamanan pangan, di antaranya melalui sosialisasi, edukasi, dan bimbingan teknis tentang pangan yang bermutu dan aman serta proses pengolahan pangan yang baik dan benar. Pengawasan keamanan pangan baik segar maupun olahan juga

ditingkatkan baik di pasar tradisional maupun pasar ritel/modern untuk menjamin pangan yang aman dan sehat bagi masyarakat melalui optimasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD).

- Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan para pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pangan yang ada di DIY, khususnya dalam mengentaskan kerawanan pangan di Desa Rawan Pangan yang masih tersisa. Dengan adanya kerjasama multisektor diharapkan dapat mempercepat penurunan jumlah desa rawan yang berimbas pada penurunan angka kemiskinan.

3. Rencana tindak lanjut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY ke depannya yaitu:

a. Urusan Pertanian

- Optimasi pemasaran dengan media daring dan berbagai aplikasi pemasaran yang sudah ada serta diversifikasi pengolahan hasil pertanian menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang lebih tahan lama dengan kualitas yang baik.
- Memperbanyak sosialisasi dan pelatihan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim bagi petani.
- Menyelenggarakan berbagai pelatihan usaha tani dan manajerial pertanian terutama untuk komoditas-komoditas yang memiliki nilai jual yang tinggi.
- Untuk mengimbangi alih fungsi lahan pertanian, perlu diciptakan lahan budidaya baru dengan memanfaatkan lahan tidur, lahan terlantar, dan tidak produktif serta mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan dalam upaya meningkatkan produksi pangan di DIY.

b. Urusan Pangan

- Melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan promosi B2SA melalui berbagai media.
- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan secara menyeluruh di seluruh wilayah DIY melalui Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD).
- Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam penanganan kerawanan pangan dan pengentasan kemiskinan.

LAMP IRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Tumbuhnya perekonomian sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan di DIY (Indikator: persentase peningkatan nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB dari tahun 2017 ke tahun 2022 sebesar 6,15%)	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Juta rupiah) (Sumber BPS)	N/A	7.112.249	7.183.372	7.255.205	7.327.757
2	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	N/A	90,22	90,52	90,82	91,12
3	(Indikator: persentase peningkatan Skor Pola Pangan Harapan dari tahun 2017 ke tahun 2022 sebesar 2,96%)	Pemenuhan pangan masyarakat	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	N/A	40,29	39,74	39,19	38,65

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2020



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Wijaya Sasana Widyadarmasraya
Jalan Gondosuli Nomor 6 Yogyakarta Telefon (0274) 588938 Faksimili (0274) 563937
Email: dpkp@jogjaprov.go.id Web: www.dpkp.jogjaprov.go.id Kode Pos 55165

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dengan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. SYAM ARJAYANTI, M.P.A.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 9 November 2020



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (<i>Sumber BPS</i>)	Juta rupiah	7.183.372	Triwulan I	7.112.249
					Triwulan II	7.112.249
					Triwulan III	7.112.249
					Triwulan IV *)	7.183.372
2.	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,52	Triwulan I	90,22
					Triwulan II	90,22
					Triwulan III	90,22
					Triwulan IV *)	90,52
3.	Pemenuhan pangan masyarakat	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	Persen	39,74	Triwulan I	40,29
					Triwulan II	40,29
					Triwulan III	40,29
					Triwulan IV *)	39,74

Keterangan

*) Data capaian kinerja bersumber dari BPS, Angka Sementara baru dirilis bulan Februari atau Maret tahun berikutnya sehingga capaian akhir tahun menggunakan Angka Prediksi OPD.

Dukungan Program/Kegiatan

Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
Total Jumlah Anggaran	37.696.918.350	19.082.402.673	(18.614.515.677)	
1. Program Administrasi Perkantoran	4.755.563.580	4.202.082.803	(553.480.777)	Sumber Anggaran :
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.824.780.700	2.863.727.260	(5.961.053.440)	1. APBD : 14.849.234.873
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	30.200.000	15.200.000	(15.000.000)	2. DAIS : 1.358.892.800
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	171.562.000	64.704.000	(106.858.000)	3. DID : 898.320.000
5. Program Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan (dilimpahkan ke Wakil Kepala Dinas)	1.452.694.250	1.057.962.500	(394.731.750)	4. DAK : 1.887.696.000
6. Program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan (dilimpahkan ke Wakil Kepala Dinas)	309.590.000	101.693.500	(207.896.500)	5. DBH CHT: 88.259.000
7. Program Pengembangan SDM Pertanian dan Penyuluhan	526.894.480	129.266.480	(397.628.000)	
8. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	8.688.304.700	3.052.579.775	(5.635.724.925)	

Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
9. Program Peningkatan Produksi Hortikultura	617.385.280	182.234.580	(435.150.700)	
10. Program Peningkatan Populasi Peternakan	2.700.425.000	582.397.000	(2.118.028.000)	
11. Program Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan	3.593.998.560	3.418.724.000	(175.274.560)	
12. Program Perlindungan Tanaman Pertanian	244.751.000	244.731.000	(20.000)	
13. Program Peningkatan Populasi Peternakan	968.185.250	256.210.250	(711.975.000)	
14. Program Pengembangan Perbenihan Pertanian	1.821.468.750	1.532.137.925	(289.330.825)	
15. Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian	41.114.800	19.858.800	(21.256.000)	
16. Program Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	2.950.000.000	1.358.892.800	(1.591.107.200)	

* Dais Urusan Kebudayaan

Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang 49,38% sehubungan adanya *refocusing kegiatan* dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.
2. Data capaian kinerja bersumber dari BPS, Angka Sementara baru dirilis bulan Februari atau Maret tahun berikutnya sehingga capaian akhir tahun menggunakan Angka Prediksi OPD.
3. Pengelolaan dana BTT sebesar Rp 764.676.000,00 untuk kegiatan:
 - a. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana untuk Penyimpanan Produk Pertanian.
 - b. Kegiatan Pendistribusian Bahan Makanan.
 - c. Kegiatan Kampanye Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal.
 - d. Kegiatan Pemberdayaan Peternak Sapi Perah.
 - e. Kegiatan Pemberdayaan Peternak Kambing Perah.
 - f. Kegiatan Bimtek Pemanfaatan Pekarangan untuk Budidaya Hortikultura.
 - g. Kegiatan Registrasi Kebun.
4. Pengelolaan dana APBN Dekonsentrasi sebesar Rp 20.926.074.000,00 melalui program:
 - a. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.
 - b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.
 - c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
 - d. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan.
 - e. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.
 - f. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian.
5. Pengelolaan dana APBN Tugas Pembantuan sebesar Rp 33.787.477.000,00 melalui program:
 - a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.
 - b. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.
 - c. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan.
 - d. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.
 - e. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang 49,38% sehubungan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.
2. Data capaian kinerja bersumber dari BPS, Angka Sementara baru dirilis bulan Februari atau Maret tahun berikutnya sehingga capaian akhir tahun menggunakan Angka Prediksi OPD.
3. Pengelolaan dana BTT sebesar Rp 764.676.000,00 untuk kegiatan:
 - a. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana untuk Penyimpanan Produk Pertanian.
 - b. Kegiatan Pendistribusian Bahan Makanan.
 - c. Kegiatan Kampanye Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal.
 - d. Kegiatan Pemberdayaan Peternak Sapi Perah.
 - e. Kegiatan Pemberdayaan Peternak Kambing Perah.
 - f. Kegiatan Bimtek Pemanfaatan Pekarangan untuk Budidaya Hortikultura.
 - g. Kegiatan Registrasi Kebun.
4. Pengelolaan dana APBN Dekonsentrasi sebesar Rp 20.926.074.000,00 melalui program:
 - a. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.
 - b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.
 - c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
 - d. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan.
 - e. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.
 - f. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian.

Yogyakarta, 9 November 2020

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Hamengku

HAMENGGU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH DAERAH
KOTA KEBAYAAN
KETAHANAN PANGAN DIY



[Signature]

K. SYAM ABJAYANTI, M.P.A.
NIP. 19671204 199303 2 004

Lampiran 3. Evaluasi LKj IP Tahun Sebelumnya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT
Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta

Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogoadi, Mlati, Kabupaten Sleman
Telp.: (0274) 562009 Fax.: (0274) 512567 e-mail: inspektorat@jogjaprov.go.id
website: <http://inspektorat.jogjaprov.go.id/> Kode Pos 55286

Yogyakarta, 13 Maret 2020

Nomor : 700/00873
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi Sistem AKIP
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Kepada
Yth. Bapak Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
di
Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Evaluasi (Evaluator) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi;

- 1) Perencanaan Strategis, meliputi sub komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
 - 2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi sub komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan;
- b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi;
 - 1) Pemenuhan Pengukuran;
 - 2) Kualitas Pengukuran;
 - 3) Implementasi Pengukuran.
 - c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi;
 - 1) Pemenuhan Pelaporan;
 - 2) Penyajian Informasi Kinerja;
 - 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
 - d. Evaluasi Internal meliputi;
 - 1) Pemenuhan Evaluasi;
 - 2) Kualitas Evaluasi;
 - 3) Pemanfaatan Evaluasi.
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi;
 - 1) Kinerja Yang di Laporkan (*Output*);
 - 2) Kinerja Yang di Laporkan (*Outcome*);
 - 3) Kinerja Yang di Laporkan (*IKU*)
 - 4) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY memperoleh katagori A, nilai sebesar 84,68% dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel;
 4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 27,37 atau 91,24% dari bobot sebesar 30%;
 - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 22,08 atau 88,33% dari bobot sebesar 25%;

- c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,70 atau 84,69% dari bobot sebesar 15%;
 - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 7,83 atau 78,33% dari bobot sebesar 10%;
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 14,69 atau 73,44% dari bobot sebesar 20%.
5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat DIY pada Evaluasi atas Implementasi SAKIP tahun 2018 yang lalu terkait pengukuran kinerja pada Dinas Pertanian DIY dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY telah dilakukan perbaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2019 seperti tersebut pada angka 4 di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY beserta seluruh jajarannya agar bisa mempertahankan kinerja yang sudah sangat baik, namun demikian masih ada tindakan perbaikan yaitu pada pencapaian sasaran/kinerja organisasi terutama pada kinerja yang dilaporkan (*output*).

Demikian laporan hasil evaluasi atas implementasi sistem AKIP Tahun 2019 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
WIYOSANTOSO, S.E., M.Acc.
No. 19680219 199403 1 005

Tembusan :
Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah DIY

